

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah yang menjadi objek penelitian adalah seluruh kabupaten/kota yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Jawa yang memiliki 4 kabupaten dan 1 kota, yakni Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Di bagian selatan, berbatasan langsung dengan Laut Indonesia, sedangkan di bagian lainnya berbatasan dengan berbagai wilayah, salah satunya Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- a. Timur: Kabupaten Klaten
- b. Tenggara: Kabupaten Wonogiri
- c. Barat: Kabupaten Purworejo

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Hingga pada saat penjajahan Jepang berakhir, kedua kerajaan tersebut telah siap menjadi sebuah negara sendiri yang merdeka, lengkap dengan sistem pemerintahannya, wilayah dan penduduknya. Sehingga setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik

Indonesia, kedua pemimpin kerajaan ini menyatakan siap untuk bergabung menjadi satu kesatuan dengan wilayah Negara Republik Indonesia. Menurut BPS (2019), luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 3.185 km², yang terbagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota madya. Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman, sedangkan untuk kota madya di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta.

2. Profil Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo memiliki luas wilayah 585,28 km², terdiri dari 12 kecamatan, 87 desa, 1 kelurahan dan 918 dukuh. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak paling barat. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kulon Progo memiliki batas-batas diantaranya:

- 1) Utara: Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah
- 2) Selatan: Samudra Hindia
- 3) Barat: Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah
- 4) Timur: Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Kabupaten Kulon Progo mempunyai kondisi geografis yang beranekaragam, yakni bagian utara merupakan dataran tinggi atau perbukitan dengan ketinggian antara 500 sampai 1.000 meter dari permukaan laut. Daerah ini meliputi Kecamatan Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang dan Samigaluh. Bagian tengah Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 meter dari permukaan air laut. Daerah ini meliputi kecamatan Sentolo, Pengasih dan Kokap. Bagian selatan adalah dataran rendah dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan air laut, bagian ini meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur dan Lendah.

b. Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah 506,85 km², terdiri dari 17 kecamatan, 75 desa dan 933 dusun. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bantul memiliki batas-batas diantaranya:

- 1) Utara: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- 2) Selatan: Samudra Indonesia
- 3) Barat: Kabupaten Kulon Progo
- 4) Timur: Kabupaten Gunungkidul

Bagian barat Kabupaten Bantul merupakan daerah landai, serta perbukitan yang membujur dari utara ke selatan. Bagian tengah adalah daerah datar dan landai sehingga bagian tengah ini juga merupakan daerah pertanian yang subur. Di bagian timur merupakan bagian

miring dan terjal, namun keadaan ini masih lebih baik dari daerah di bagian barat. Bagian selatan merupakan bagian dari tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang Pantau Selatan dari Kecamatan Srandak, Sanden hingga Kretek.

c. Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibukotanya Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Wonosari terletak di sebelah tenggara Kota Yogyakarta (Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta). Wilayah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 18 kecamatan dan 144 desa. Batas wilayah Kabupaten Gunungkidul diantaranya:

- 1) Utara: Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo
- 2) Selatan: Samudra Hindia
- 3) Barat: Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman
- 4) Timur: Kabupaten Wonogiri

d. Kabupaten Sleman

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 574,82 km² atau sekitar 18% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif terdiri 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun. Batas wilayah Kabupaten Sleman diantaranya:

- 1) Utara: Kabupaten Boyolali
- 2) Selatan: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul
- 3) Barat: Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang
- 4) Timur: Kabupaten Klaten

Kabupaten Sleman keadaan tanahnya dibagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan dibagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Makin ke utara relatif miring dan dibagian utara sekitar Lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air. Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan. Topografi dapat dibedakan atas dasar ketinggian tempat dan kemiringan lahan (lereng).

e. Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus kabupaten. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 kecamatan, 45

kelurahan. Dengan kepadatan rata-rata 15.000 jiwa/km². Batas wilayah

Kota Yogyakarta diantaranya:

- 1) Utara: Kabupaten Sleman
- 2) Selatan: Kabupaten Bantul
- 3) Barat: Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman
- 4) Timur: Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman

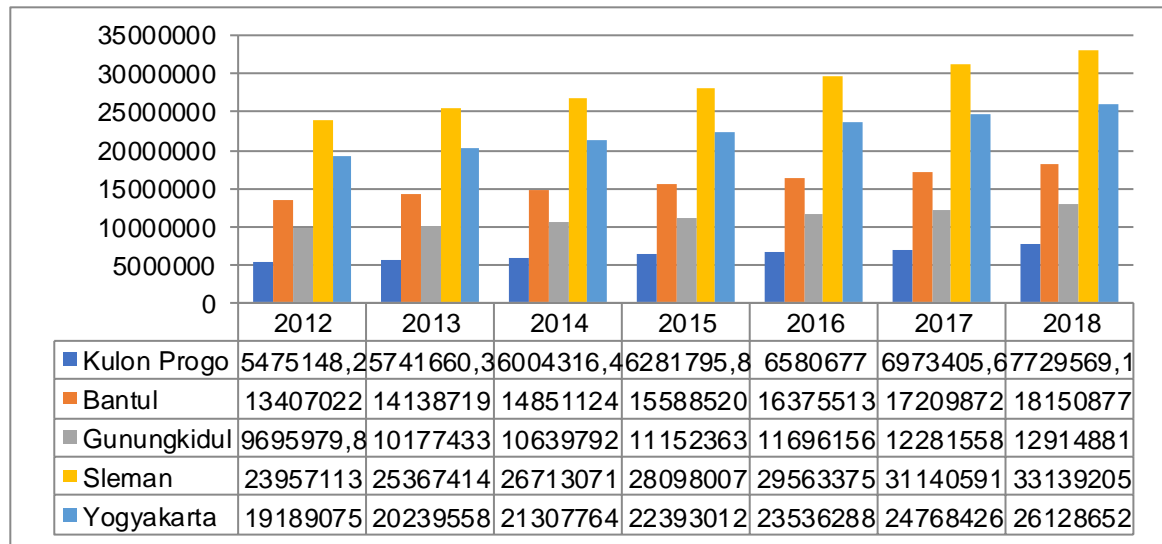
Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintasi Kota Yogyakarta antara lain Sungai Gajah Wong di sebelah timur, Sungai Code di bagian tengah dan di sebelah barat terdapat Sungai Winongo.

B. Gambaran Umum Variabel Operasional

1. PDRB (Produk Domestik Regional)

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selalu berusaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya agar dapat tumbuh dengan maksimal serta dapat menunjukkan peningkatan yang baik setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan nilai PDRB di wilayah tersebut. Oleh sebab itu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berbagai upaya telah dilakukan seperti pengambilan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk pembangunan PDRB sendiri merupakan

penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir yang mencakup nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode satu tahun.



Sumber: *BPS Daerah Istimewa Yogyakarta*

GAMBAR 4.1.
Nilai PDRB Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2012-2018 (Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar di atas, nilai PDRB Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta selalu mengalami peningkatan yang cukup stabil. Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai PDRB terendah diantara 5 kabupaten/kota lainnya, sedangkan Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memiliki nilai PDRB tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, terlihat pada grafik bahwa kenaikan nilai PDRB terjadi cukup stabil, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 7 tahun terakhir ini juga stabil.

2. Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah penduduk yang setiap tahunnya selalu meningkat juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan jumlah angkatan kerja, di mana dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan menyebabkan bertambahnya jumlah angkatan kerja yang tersedia. Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan semakin banyak jumlah angkatan kerja yang bekerja maka tenaga kerja tersebut semakin produktif yang pada akhirnya dapat meningkatkan output daerah. Tenaga kerja yang bekerja merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi, karena merekalah yang melaksanakan pembangunan ekonomi.

TABEL 4.1.
Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2012-2018 (Jiwa)

Tahun	Kabupaten/Kota				
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
2012	218.042	488.773	414.815	544.438	201.640
2013	228.572	472.808	420.454	568.419	195.818
2014	236.536	488.734	424.669	590.080	216.024
2015	232.190	495.235	386.458	567.286	210.049
2016	239.574	540.756	418.678	629.645	213.387
2017	239.542	541.512	422.391	636.132	213.591
2018	249.186	561.731	437.238	645.596	224.641

Sumber: *BPS Daerah Istimewa Yogyakarta*

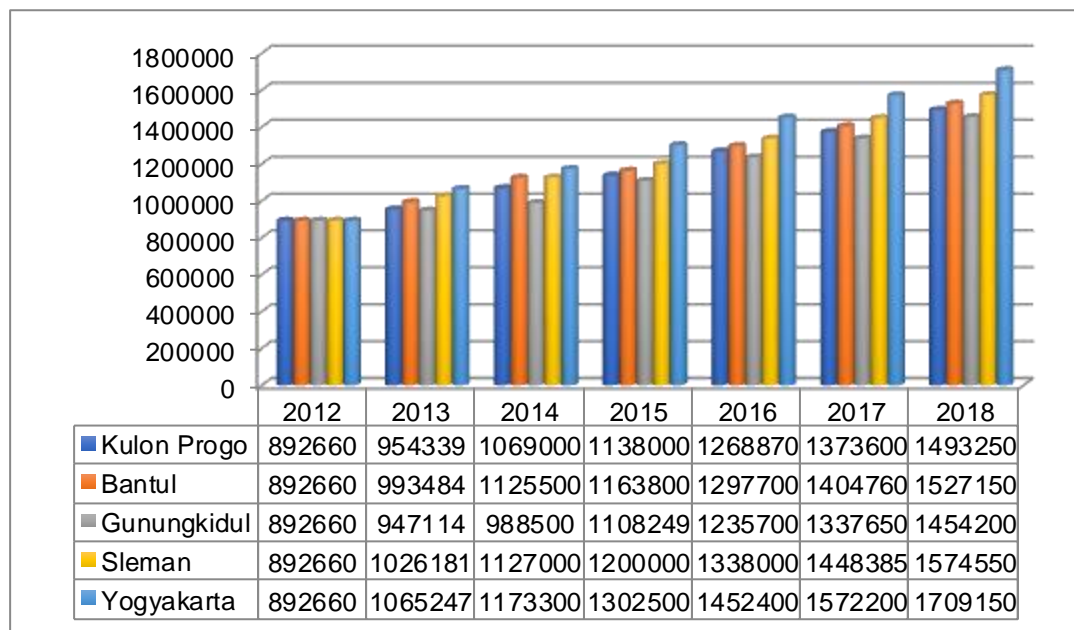
Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa jumlah tenaga kerja di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi.

Hampir semua kabupaten/kota pada tahun 2015 mengalami penurunan jumlah tenaga kerja kecuali Kabupaten Bantul. Penurunan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Bantul pada tahun 2013, penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 15.965 pekerja. Pada tahun 2017 hanya Kabupaten Kulon Progo yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 32 pekerja. Pada tahun 2018, terlihat tidak ada penurunan jumlah tenaga kerja di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota)

Demi mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, maka perlu ditetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya. Upah minimum adalah pendapatan bulanan terendah yang akan diterima oleh pekerja sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja untuk suatu jasa yang telah dilakukan oleh pekerja. Upah minimum dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu peraturan perundang-undangan dan dibayarkan dengan suatu perjanjian kerja antara karyawan dan pemberi kerja, termasuk kesepakatan pemberian tunjangan kepada karyawan.

UMP (Upah Minimum Provinsi) ditetapkan oleh gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dewan pengupahan melalui proses yang panjang. UMK mulai tahun 2013 ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota, sedangkan untuk UMP Daerah Istimewa Yogyakarta diambil dari UMK terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Gunungkidul.



Sumber: *BPS Daerah Istimewa Yogyakarta*

GAMBAR 4.2.
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2018 (Rupiah)

Terlihat pada gambar di atas, pada tahun 2012 upah minimum kabupaten/kota masih sama, yakni sebesar Rp 892.660,00 hal ini terjadi karena upah masih ditentukan oleh pemerintah provinsi yang menentukan

besaran upah melalui UMP dan belum memberlakukan UMK. Kemudian dari tahun 2013 masing-masing kabupaten/kota memiliki UMK sendiri dengan urutan UMK dari yang terbesar hingga terkecil yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

4. PAD (Pendapatan Asli Daerah) Sektor Pariwisata

Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata merupakan pendapatan daerah yang didapatkan dari penjumlahan berbagai jenis pajak dan retribusi di sektor pariwisata seperti pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, retribusi penggunaan kekayaan daerah, retribusi penginapan, retribusi tempat rekreasi dan pendapatn lain yang sah. Pajak daerah tersebut diperoleh dari hasil pelayanan masing-masing bidang. Seperti pajak hotel dan restoran diperoleh dari hasil pelayanan hotel dan restoran. Pajak hiburan diperoleh dari pelayanan hiburan yang mendatangkan orang serta dipungut biaya. Berikut ini merupakan rincian PAD sektor pariwisata tahun 2018.

TABEL 4.2.
Jumlah PAD Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2018 (Ribuan Rupiah)

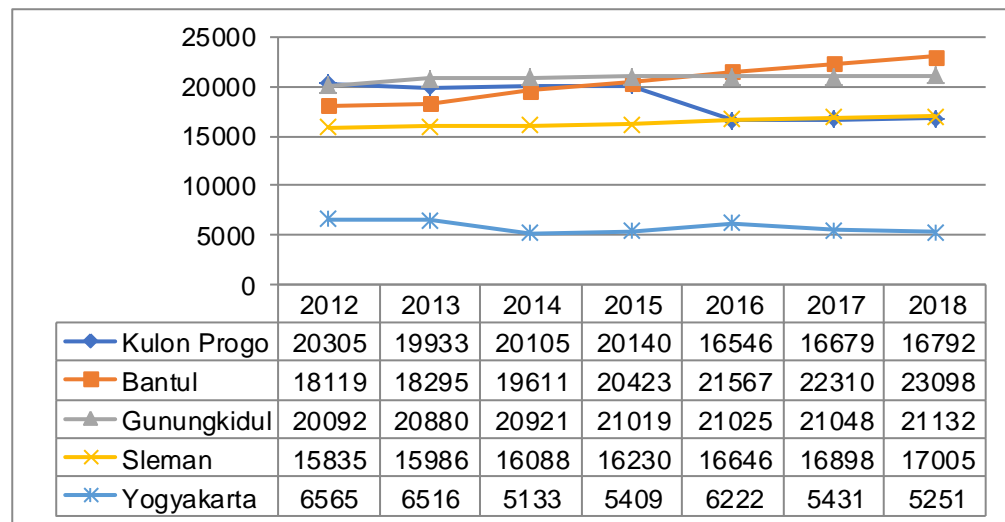
Tahun	Kabupaten/Kota				
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
2012	2.110.852	12.529.648	8.478.768	53.194.492	76.842.343
2013	2.646.017	14.533.814	8.168.857	68.632.186	94.842.343
2014	2.544.116	16.046.012	17.415.256	84.780.228	116.146.937
2015	3.420.775	18.281.328	24.107.913	104.985.103	116.146.937
2016	4.004.045	21.901.265	28.375.386	137.152.076	162.390.766
2017	5.323.778	17.774.915	32.758.749	180.915.056	186.241.789
2018	6.570.895	47.172.657	25.786.325	218.475.245	177.219.549

Sumber: *Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta*

Tabel di atas menunjukkan jumlah PAD sektor pariwisata kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2018. Terdapat 5 sumber penerimaan PAD sektor pariwisata, yaitu pajak hotel dan restaurant, pajak tontonan atau hiburan, retribusi objek dan daya tarik wisata, retribusi perijinan usaha pariwisata dan retribusi penggunaan asset milik pemerintah daerah bisa dalam bentuk sewa, kontrak atau bagi hasil. PAD sektor pariwisata dengan jumlah tertinggi yakni Kota Yogyakarta, sedangkan PAD sektor pariwisata terendah ditempati oleh Kabupaten Kulon Progo. Jumlah PAD sektor pariwisata ini berfluktuatif setiap tahunnya. Prosentase kenaikan tertinggi selama 7 tahun dialami oleh Kabupaten Bantul, tingga prosentase kenaikan PAD sektor pariwisata mencapai 165,4% pada tahun 2018 atau yang awalnya jumlah PAD sektor pariwisata Rp17.774.915.394,00 menjadi Rp47.172.656.857,00.

5. Jumlah Industri

Sektor industri diyakini sebagai pemecah permasalahan pembangunan karena sektor ini dapat menggerakkan sektor-sektor lain dalam perekonomian. Selain dapat menciptakan lapangan pekerjaan, sektor ini juga dapat menjadi tumpuan. Hal ini dikarenakan sektor industri mampu menciptakan nilai tambah dengan karakteristik dapat menciptakan inovasi baru, spesialisasi dan efisiensi pada tingkat produksi.



Sumber: BPS (berbagai terbitan)

GAMBAR 4.3.
Jumlah Industri di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2018-2019 (Unit)

Gambar di atas menunjukkan jumlah industri yang ada di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini digunakan data jumlah industri kecil, menengah, sedang dan besar. Jumlah industri di kabupaten/kota berfluktuatif, di Kabupaten Bantul jumlah industri terlihat mengalami kenaikan pada periode tahun 2012-

2018, sama halnya dengan Kabupaten Sleman yang jumlah industrinya semakin meningkat. Hal ini berbeda dengan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta yang jumlah industrinya berfluktuatif. Kota Yogyakarta memiliki jumlah industri terkecil di Daerah Istimewa Yogyakarta.